

Kemiskinan yang Menguntungkan: Analisis Kritis Program BLT di Desa Sumengko Kabupaten Nganjuk

M. Abu Dzar Al-Ghifar¹, Dewien Nabelah Agustin²

^{1,2}Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: ¹malghifari.22078@mhs.unesa.ac.id, ²dewienagustin@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara kritis pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sumengko, Kabupaten Nganjuk, dengan menggunakan perspektif teori fungsi laten kemiskinan dari Herbert Gans. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengandalkan wawancara mendalam dengan penerima manfaat, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, serta studi literatur dan dokumen desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BLT-DD dirancang sebagai bentuk perlindungan sosial selama pandemi COVID-19, dalam praktiknya program ini memperkuat ketimpangan sosial, menciptakan ketergantungan ekonomi, dan memperbesar kontrol simbolik aparat desa terhadap warga. Proses distribusi bantuan kerap berlangsung tanpa transparansi dan partisipasi, sehingga warga miskin hanya diposisikan sebagai objek pasif yang menerima kebijakan tanpa ruang negosiasi. Program ini juga digunakan untuk memperkuat legitimasi politik aktor lokal, terutama menjelang pemilihan kepala desa. Temuan ini sejalan dengan teori Gans bahwa kemiskinan memiliki fungsi tersembunyi yang menguntungkan kelompok dominan secara ekonomi, politik, dan simbolik. Oleh karena itu, kemiskinan tidak hanya muncul sebagai akibat ketimpangan struktural, tetapi juga dipelihara melalui mekanisme sosial yang terorganisir. Penelitian ini merekomendasikan perlunya transformasi kebijakan bantuan sosial dari pendekatan karitatif menuju model yang partisipatif dan memberdayakan.

Kata Kunci: BLT, Kemiskinan Struktural, Fungsi Laten, Relasi Kuasa.

Abstract

This article critically examines the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) program in Sumengko Village, Nganjuk Regency, using Herbert Gans' theory of the latent functions of poverty. Employing a descriptive qualitative approach, the research is based on in-depth interviews with recipients, village officials, and community leaders, as well as literature review and local documents. The findings reveal that although BLT-DD was designed as a social protection measure during the COVID-19 pandemic, in practice it has reinforced social inequality, created economic dependency, and strengthened the symbolic control of village elites over citizens. The distribution process often lacks transparency and public participation, positioning the poor as passive recipients with little room to engage or question. The program also serves as a tool for political legitimization, particularly in the context of local electoral politics. These findings support Gans' argument that poverty performs hidden functions benefiting dominant groups—economically, politically, and symbolically. Thus, poverty in rural areas is not merely a result of structural disparities but is actively maintained through organized social mechanisms. The study recommends a transformation of social assistance policies toward more participatory and empowering models beyond short-term charity.

Keywords: BLT, Structural Poverty, Latent Function, Power Relations.

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan realitas sosial yang terus-menerus hadir dan menjadi bagian integral dari dinamika pembangunan nasional. Sejak era Orde Baru hingga pasca-reformasi, berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diluncurkan oleh negara—mulai dari Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM), Bantuan

Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa pandemi COVID-19. Salah satu bentuk bantuan yang paling populer dan massif distribusinya adalah BLT Dana Desa yang mulai digulirkan secara resmi sejak 2020 melalui Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau rentan dalam bentuk uang tunai (Awalia & Sumayya, 2024). Tujuan utama dari program ini adalah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19. BLT bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan mengurangi beban ekonomi yang mereka hadapi. Namun, dampak dari program ini bersifat sementara dan belum mampu mengatasi kemiskinan struktural dalam jangka panjang. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan program bantuan sosial yang bersumber dari Dana Desa dan diberikan secara tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu yang tinggal di wilayah perdesaan. justru dapat dipahami melalui perspektif Herbert Gans sebagai bagian dari mekanisme struktural yang secara tidak langsung mempertahankan eksistensi kemiskinan itu sendiri. Meskipun awalnya program ini muncul sebagai respon pemerintah terhadap dampak ekonomi pandemi COVID-19, bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat desa serta mencegah meningkatnya angka kemiskinan ekstrem di perdesaan.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, BLT-DD diberikan kepada keluarga miskin non-penerima bantuan sosial lainnya, yang mengalami kehilangan mata pencaharian, memiliki anggota keluarga yang rentan (lansia, disabilitas, penyakit kronis), serta tidak memiliki cadangan ekonomi. Secara praktis, program ini memberikan bantuan per bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama periode tertentu yang ditentukan oleh kebijakan nasional dan disesuaikan oleh pemerintah desa. Dalam konteks tata kelola, desa diberikan kewenangan untuk melakukan pendataan, verifikasi, validasi, dan penetapan penerima BLT-DD, sehingga potensi bias sosial, konflik kepentingan, dan intervensi elite lokal menjadi persoalan yang krusial untuk dikaji secara kritis. BLT-DD berhasil meringankan beban ekonomi warga desa dalam jangka pendek, pelaksanaannya kerap kali menghadapi masalah dalam pendataan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga berpotensi memperkuat relasi kuasa yang timpang antara aparat desa dan warga penerima (Wulandari & Nugroho, 2022).

Salah satu kritik utama terhadap program BLT-DD adalah pendataan yang salah, yang memungkinkan nepotisme, manipulasi data, dan konflik horizontal di desa. Dalam penelitian Putri et al. (2022) menemukan bahwa pendataan berdasarkan RT/RW seringkali tidak adil, menyingkirkan warga miskin yang tidak dekat dengan perangkat desa. Sama seperti yang dikemukakan Sandrawati (2022) melaporkan bahwa beberapa penerima bantuan tidak memenuhi syarat, sementara mereka yang seharusnya menerima diabaikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa bantuan finansial memperkuat relasi kuasa informal dalam masyarakat desa daripada meningkatkan keadilan sosial. Aparatur desa seringkali tidak dapat mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan dana BLT secara jelas. Meskipun partisipasi masyarakat yang tinggi dan akses informasi publik yang mudah diakses melalui papan pengumuman, masih terjadi kekeliruan dalam pelaporan karena kurangnya pelatihan teknis dan pengawasan (Yusuf et al. 2021). Kapasitas minimal inilah yang membuat dana desa rentan terhadap kesalahan administratif dan praktik koruptif, yang pada akhirnya menyebabkan kesenjangan sosial dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Efek ekonomi BLT-DD biasanya konsumtif dan tidak transformasional. Eni dan Razak (2021) menunjukkan bahwa meskipun bantuan tunai dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk kebutuhan pokok, ia tidak serta-merta mengurangi kesenjangan ekonomi. Meskipun bantuan telah diberikan, indeks Gini beberapa desa mencapai 0,536, menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi. Dengan kata lain, program BLT tidak hanya tidak berhasil menyelesaikan akar kemiskinan, tetapi juga berpotensi memperkuatnya dalam bentuk baru, seperti ketergantungan, subordinasi terhadap aktor desa, dan kurangnya dorongan untuk menghasilkan uang. Orang miskin, menurut Gans, memungkinkan sistem sosial mempertahankan upah murah, menyediakan ladang pekerjaan bagi profesi sosial, serta menjaga stabilitas sistem kekuasaan melalui relasi patron-klien. Program BLT dirancang sebagai intervensi jangka pendek untuk membantu warga miskin dan terdampak pandemi dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun dalam implementasinya, program ini kerap menuai kritik karena dianggap tidak menyentuh akar struktural kemiskinan serta rawan dikendalikan oleh kepentingan politik lokal (Kusnadi, 2021; Nugroho, 2023).

Desa Sumengko, yang berada di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, merupakan salah satu lokasi yang secara rutin menerima alokasi BLT Dana Desa sejak 2020 hingga kini. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Nganjuk (2024), Desa Sumengko memiliki tingkat kemiskinan sekitar 10,17 %, dari total rumah tangga, dengan angka pengangguran terbuka di kecamatan mencapai 4,74%. Jika ditelusuri secara historis, kemiskinan di Desa Sumengko berkorelasi dengan beberapa faktor structural seperti ketergantungan pada sektor pertanian subsisten serta minimnya diversifikasi ekonomi lokal. Meskipun pemerintah desa telah mengalokasikan dana desa untuk program padat karya dan BLT, kemajuan sosial-ekonomi masyarakat

tidak menunjukkan tren yang signifikan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa kemiskinan terus bertahan bahkan setelah intervensi negara berlangsung selama bertahun-tahun? Sumengko dipilih sebagai lokasi penelitian karena sejak 2020, desa ini telah menerima alokasi BLT-DD secara teratur dan memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang unik. Desa ini adalah salah satu desa pertanian besar di Kecamatan Sukomoro. Ini juga merupakan pusat industri rumah tangga shuttlecock, yang produknya telah sukses di pasar domestik dan internasional. Tingkat kemiskinan di desa ini masih tinggi meskipun ada dua sektor ekonomi yang potensial seperti pertanian dan industri. Hal ini menunjukkan adanya paradoks aktivitas ekonomi produktif yang tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sinilah pentingnya mempelajari bagaimana kemiskinan dipertahankan dan sejauh mana bantuan sosial seperti BLT-DD menjadi bagian dari mekanisme sosial yang justru memperkuat ketimpangan dan hubungan kekuasaan di tingkat desa.

Di sinilah relevansi perspektif sosiologis Herbert J. Gans (1972) menjadi signifikan. Dalam esainya yang berjudul “The Positive Functions of Poverty”, Gans berargumen bahwa kemiskinan bukanlah sekadar residu dari pembangunan, melainkan elemen yang secara fungsional dibutuhkan oleh kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat. Kemiskinan memiliki fungsi laten, di antaranya menyediakan tenaga kerja murah, menjaga stabilitas harga, menjadi ladang pekerjaan bagi profesi sosial, dan memungkinkan sistem kekuasaan lokal untuk mempertahankan kontrol melalui patronase dan distribusi sumber daya secara selektif. Di Desa Sumengko implementasi BLT sering kali bukan sekadar proses administratif, melainkan arena kontestasi dan negosiasi kekuasaan. Kepala desa, perangkat, dan tokoh masyarakat lokal memiliki kontrol signifikan terhadap siapa yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Meskipun secara formal proses verifikasi dilakukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), praktik di lapangan menunjukkan adanya fleksibilitas yang tinggi, di mana hubungan kedekatan personal dan politik dapat memengaruhi keputusan. Fenomena ini sejalan dengan temuan Sulistiyono (2020) mengenai praktik “kemiskinan yang dinegosiasikan” di desa-desa Jawa, di mana bantuan sosial berfungsi sebagai alat reproduksi patronase.

Lebih lanjut, keberadaan BLT secara tidak langsung juga menunda tekanan sosial dan ekonomi yang seharusnya diarahkan pada transformasi struktural. Alih-alih mendorong perubahan dalam kepemilikan lahan, akses pendidikan, atau diversifikasi ekonomi lokal, program bantuan tunai menciptakan ilusi keberpihakan negara terhadap rakyat miskin tanpa mengganggu struktur kekuasaan yang menciptakan dan mempertahankan kemiskinan itu sendiri. Ferguson (1990) menyebut kondisi ini sebagai *anti-politics machine*—mekanisme teknokratis yang menutupi relasi kuasa dan konflik struktural melalui proyek-proyek pembangunan yang tampak netral secara politik.

Program BLT juga memiliki dimensi elektoral yang kuat. Beberapa studi menemukan bahwa distribusi bantuan sosial kerap kali digunakan untuk membangun basis dukungan politik, terutama menjelang pemilihan kepala desa atau pemilu legislatif (Hadiz & Robison, 2017). Di Desa Sumengko, fenomena serupa tampak dalam pola alokasi bantuan yang konsisten berpihak pada kelompok tertentu. Ketergantungan warga terhadap bantuan ini dimanfaatkan oleh elite lokal untuk mempertahankan legitimasi dan otoritasnya. Hal ini mengkonfirmasi salah satu argumen utama Gans, bahwa kemiskinan memiliki nilai politis dan simbolik yang penting bagi kelompok yang berkuasa. Dengan demikian, permasalahan kemiskinan di Desa Sumengko tidak dapat dipahami secara parsial sebagai kegagalan teknis kebijakan, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari relasi sosial-ekonomi yang lebih luas, di mana BLT justru berfungsi untuk menstabilkan ketimpangan, bukan menguranginya. BLT bukan hanya instrumen bantuan, tetapi juga medium kekuasaan, pengendalian, dan reproduksi status quo.

Sebagian besar studi yang telah ada lebih menekankan aspek administratif, efektivitas teknis, atau kepatuhan terhadap regulasi, sementara belum banyak yang mengkaji secara mendalam fungsi sosial dan politik dari kemiskinan itu sendiri dalam kerangka sosiologis yang kritis. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggunakan teori fungsi laten kemiskinan dari Herbert Gans, untuk menjelaskan bahwa kemiskinan tidak semata-mata sebagai kondisi yang harus diatasi, tetapi dapat berfungsi secara tersembunyi bagi kelompok tertentu di tingkat lokal, termasuk dalam konteks distribusi BLT. Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana program BLT Dana Desa di Desa Sumengko melahirkan dan mereproduksi fungsi-fungsi laten kemiskinan sebagaimana dijelaskan oleh Herbert Gans? Penelitian ini secara khusus menelaah bagaimana bantuan tunai digunakan sebagai alat penguat relasi kuasa, menciptakan ketergantungan ekonomi warga miskin, memperkuat legitimasi elite lokal, serta membentuk stigma sosial atas kemiskinan yang berfungsi secara simbolik. Rumusan ini diarahkan untuk menggali praktik distribusi BLT tidak hanya sebagai kebijakan administratif, tetapi sebagai mekanisme sosial-politik yang memelihara ketimpangan struktural di tingkat desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam dinamika pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sumengko, Kabupaten Nganjuk, serta bagaimana fenomena kemiskinan yang dihadapi masyarakat lokal memiliki fungsi-fungsi sosial yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pendekatan kualitatif dinilai tepat untuk menelaah realitas sosial yang kompleks dan tidak terukur secara kuantitatif, terutama ketika fokus penelitian diarahkan pada konstruksi sosial dan relasi kepentingan yang tersembunyi dalam kebijakan sosial (Creswell, 2016; Denzin & Lincoln, 2018). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas sosial yang kompleks dan tidak dapat direduksi ke dalam angka, karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini paling cocok untuk mempelajari bagaimana kemiskinan dianggap sebagai kondisi ekonomi dan sebagai struktur sosial dan simbolik yang dipelihara dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini secara khusus terkait dengan teori fungsi laten kemiskinan Herbert Gans. Menurut teori ini, kemiskinan tidak dapat diukur secara kuantitatif karena hanya dapat diungkap melalui makna, pengalaman, narasi, dan relasi sosial yang hidup di tingkat lokal.

Desa Sumengko dipilih sebagai lokasi penelitian melalui teknik purposive karena merupakan salah satu desa di Kecamatan Sukomoro yang secara konsisten menerima alokasi BLT sejak beberapa tahun terakhir. Selain itu, desa ini memiliki dinamika sosial dan politik lokal yang memperlihatkan kecenderungan adanya praktik seleksi penerima bantuan yang tidak sepenuhnya transparan, serta indikasi relasi kuasa antara aparat desa dan warga penerima.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yakni wawancara mendalam dan studi literatur. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap sejumlah informan kunci, antara lain: penerima bantuan BLT berturut-turut, peneliti memilih informan dari kelompok sasaran utama penerima BLT melalui data awal dari perangkat desa dan pengamatan langsung di lapangan. Kemudian, peneliti memilih beberapa informan dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi, seperti janda, lansia, dan buruh tani. Selain itu informan juga dari aparat desa yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan, tokoh masyarakat, serta pihak yang memiliki pengetahuan kontekstual tentang kebijakan sosial di desa. Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti di awal, tetapi bersifat fleksibel dan terus berkembang mengikuti prinsip kejenuhan data (*data saturation*), yakni saat informasi yang diperoleh dari wawancara tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan. Teknik ini memungkinkan eksplorasi narasi subyektif warga dan aktor kebijakan mengenai bagaimana kemiskinan dipahami, dialami, dan dikelola dalam praktik. Sementara itu, studi literatur digunakan untuk memperoleh data sekunder, seperti daftar penerima BLT, notulen musyawarah desa, arsip kebijakan desa, dan jurnal terkait.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teori fungsi laten kemiskinan yang dikemukakan oleh Herbert J. Gans (1972). Teori ini berpandangan bahwa kemiskinan bukan semata-mata sebagai kondisi kekurangan, tetapi memiliki fungsi sosial yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, seperti elite ekonomi, birokrasi, dan kelas menengah. Dalam konteks ini, BLT diposisikan bukan sekadar sebagai instrumen kesejahteraan, melainkan sebagai alat reproduksi sosial yang melanggengkan ketergantungan, ketimpangan relasi kuasa, serta legitimasi simbolik bagi aktor-aktor dominan di tingkat lokal. Data dipelajari melalui analisis tematik. Pertama, temuan wawancara ditranskripsi dan dibaca berulang kali untuk mendapatkan makna yang paling penting. Selain itu, peneliti memberikan kode untuk elemen yang relevan, seperti pengalaman menerima BLT, ketakutan, ketergantungan, atau perasaan malu. Kemudian kode-kode ini disusun menjadi kelompok-kelompok yang mewakili tema-tema penting, seperti fungsi kemiskinan dalam hal ekonomi, sosial, atau politik. Selanjutnya, untuk memahami bagaimana bantuan sosial seperti BLT digunakan dalam relasi kuasa di desa, tema-tema tersebut dihubungkan dengan teori Herbert Gans tentang fungsi laten kemiskinan. Proses ini dilakukan secara bertahap hingga diperoleh gambaran yang lengkap tentang subjek penelitian.

Proses penelitian dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian sosial, termasuk menjamin kerahasiaan identitas informan, memperoleh persetujuan partisipan sebelum wawancara (*informed consent*), serta menyimpan data secara aman untuk keperluan analisis. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi terbatas selama peneliti berada di lapangan (Patton, 2002). Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretik dalam memahami bagaimana program bantuan sosial seperti BLT tidak hanya menjadi solusi atas kemiskinan, melainkan juga berpotensi menjadi mekanisme yang mempertahankan struktur sosial yang timpang. Sekaligus, penelitian ini menawarkan refleksi kritis terhadap pelaksanaan kebijakan sosial yang sering kali luput dari evaluasi struktural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan Struktural di Desa Sumengko

Menurut Herbert Gans, kemiskinan struktural adalah jenis kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial dan ekonomi masyarakat itu sendiri, bukan hanya karena ketidakmampuan individu (Gans, 1971). Dengan kata lain, kemiskinan ini disebabkan oleh sistem sosial yang membatasi akses seseorang terhadap sumber daya, pekerjaan yang layak, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Gans menekankan bahwa kemiskinan ini bersifat "terstruktur" karena ada mekanisme sosial dan ekonomi yang membuat kelompok tertentu tetap miskin secara terus-menerus, seperti diskriminasi, segregasi tempat tinggal, sistem pendidikan yang tidak merata, dan kurangnya kesempatan kerja. Jadi, kemiskinan struktural adalah hasil dari pola dan aturan sosial yang ada dalam masyarakat yang membuat kemiskinan sulit diatasi hanya dengan usaha individu.

Desa Sumengko, yang terletak di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, merupakan wilayah agraris dengan mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian, khususnya budidaya padi. Namun, tantangan seperti keterbatasan lahan, modal, dan tenaga kerja menjadi kendala dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Sebuah studi menunjukkan bahwa luas lahan sawah yang dimiliki petani berkisar antara 0,084 hingga 0,697 hektar, dengan modal yang digunakan sekitar Rp1.210.000 hingga Rp7.931.000, dan tenaga kerja antara 29 hingga 48 orang. Produksi padi yang dihasilkan berkisar antara 5 hingga 47 kuintal, yang mencerminkan keterbatasan dalam skala produksi pertanian di desa ini. Meskipun demikian, Desa Sumengko dikenal sebagai pusat industri kerajinan shuttlecock di Kabupaten Nganjuk. Industri ini berawal pada tahun 1970-an oleh Munaryo, yang mempelajari teknik pembuatan shuttlecock di Solo dan kemudian mengembangkan usaha ini di desanya. Saat ini, terdapat sekitar 70 pengusaha shuttlecock di desa tersebut, dengan produksi mencapai pasar nasional dan internasional, termasuk Malaysia, Singapura, China, dan Jepang. Industri ini telah membuka lapangan pekerjaan bagi warga setempat dan berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan di desa.

Industri shuttlecock memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa, sebagian besar warga masih menghadapi tantangan ekonomi. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk mencapai 108,37 ribu jiwa atau 10,17 persen dari total penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Desa Sumengko bersifat struktural, di mana sektor informal seperti industri rumahan belum sepenuhnya mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam mengatasi kemiskinan di desa ini. Rendahnya tingkat pendidikan di kalangan pengrajin shuttlecock juga menjadi faktor penyebab kemiskinan struktural. Data dari desa menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk merupakan lulusan SMP dan SMA, yang berdampak pada kurangnya pemahaman mereka terhadap manajemen usaha dan keuangan. Hal ini mengakibatkan rendahnya efisiensi produksi dan pendapatan yang diperoleh, serta terbatasnya kemampuan mereka untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, meskipun industri shuttlecock memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa, sebagian besar warga masih menghadapi tantangan ekonomi. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk mencapai 108,37 ribu jiwa atau 10,17 persen dari total penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Desa Sumengko bersifat struktural, di mana sektor informal seperti industri rumahan belum sepenuhnya mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Program BLT sebagai Respons Negara terhadap Kemiskinan

Selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mengalokasikan Dana Desa untuk program BLT guna membantu masyarakat desa yang terdampak secara ekonomi. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No.13 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020, yang menetapkan bahwa BLT Dana Desa merupakan salah satu bentuk jaring pengaman sosial (JPS) yang wajib dianggarkan dan disalurkan oleh pemerintah desa. Tujuannya adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi. Di tingkat lokal, implementasi BLT, khususnya yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD), menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi masyarakat desa. Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur, turut menjalankan kebijakan ini dengan berbagai dinamika yang menyertainya.

Penyaluran BLT-DD di Nganjuk berlangsung di sejumlah desa dengan mekanisme yang relatif seragam, namun tidak tanpa kendala. Misalnya, di Desa Mlorah, Kecamatan Rejos, pada tahun anggaran 2024, pemerintah desa menyalurkan BLT kepada 29 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nominal Rp300.000 per bulan. Penyaluran ini dilakukan secara partisipatif, bahkan melibatkan mahasiswa Kuliah

Kerja Nyata Tematik (KKNT) dari UPN "Veteran" Jawa Timur, yang turut membantu proses administrasi dan dokumentasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT-DD tidak hanya berdampak pada penerima manfaat, tetapi juga membuka ruang bagi keterlibatan institusi pendidikan dalam kerja-kerja sosial di tingkat desa. Namun demikian, distribusi BLT tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, terjadi keterlambatan pencairan BLT-DD pada awal tahun 2021 akibat belum rampungnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akibatnya, 15 KPM hanya menerima satu kali pencairan hingga bulan April. Fenomena ini mencerminkan lemahnya koordinasi administratif yang dapat berdampak langsung pada keterlambatan akses bantuan bagi kelompok rentan (Radar Kediri, 2021).

Di Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa menjadi sumber penghidupan bagi banyak rumah tangga miskin. Dalam kondisi ekonomi yang serba sulit, terutama pasca-pandemi COVID-19 dan di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, BLT berperan penting sebagai satu-satunya pemasukan tetap yang dapat diandalkan sebagian warga desa. Bantuan tunai yang diberikan setiap bulan ini menjadi penyangga kebutuhan dasar seperti beras, minyak goreng, dan keperluan rumah tangga lainnya. Sebagai bagian dari program nasional untuk menangani dampak ekonomi dan sosial pandemi, Desa Sumengko secara konsisten menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sejak tahun 2020. Orang-orang di desa yang miskin atau tidak mampu ditargetkan melalui program ini, yang memberikan bantuan sebesar Rp300.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan. Jadwal pencairan diatur setiap tanggal sepuluh dan dilakukan di balai desa oleh perangkat desa, petugas pos, dan pendamping desa. Penyerahan BLT dilakukan secara tunai melalui kerja sama dengan Bank Jatim, dan perangkat desa dan pendamping hadir langsung ke lokasi pencairan. Warga yang menerima BLT terlebih dahulu menerima undangan resmi, dan bagi mereka yang tidak dapat hadir karena usia lanjut atau kondisi sakit menahun, bantuan akan diantar langsung ke rumah mereka. Pada tahun ini, kriteria penerima BLT-DD di Desa Sumengko mengalami penyesuaian, mengikuti Petunjuk Teknis Kemendesa dan mempertimbangkan kondisi lokal masyarakat. Adapun kriteria yang ditetapkan meliputi:

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Sumengko;
2. Termasuk dalam kategori miskin ekstrem;
3. Kehilangan mata pencaharian (misalnya karena PHK atau tidak bekerja tetap);
4. Memiliki anggota keluarga yang menderita sakit menahun atau kronis;
5. Tidak menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT, BLT APBN, atau bantuan dari program non-PKH;
6. Lansia tunggal atau rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan.

Proses pelaksanaan ini menunjukkan bahwa penyebaran BLT-DD di Desa Sumengko dilakukan dengan pendekatan yang cukup personal dan lokal adaptif. Namun demikian, metode ini juga memungkinkan praktik informal, yang sering dipengaruhi oleh kuasa lokal dan relasi sosial. Menurut wawancara, beberapa warga tidak tahu mengapa mereka dipilih sebagai penerima, dan sebagian lainnya menerima bantuan berulang kali meskipun mereka berada dalam kondisi ekonomi yang lebih baik.

Ketergantungan pada BLT ini muncul karena terbatasnya akses terhadap pekerjaan tetap atau sumber penghasilan alternatif. Sebagian besar penerima adalah lansia, janda, buruh tani, dan pekerja informal yang penghasilannya tidak menentu. Dalam wawancara dengan beberapa warga, diketahui bahwa tanpa BLT, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan harian, membayar biaya sekolah anak, bahkan untuk membeli obat-obatan. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih diberikan di beberapa tempat, termasuk di Desa Sumengko, Kabupaten Nganjuk, meskipun pemerintah secara resmi mengakhiri pandemi COVID-19. Di tengah upaya normalisasi ekonomi nasional, keberlanjutan program ini menimbulkan pertanyaan penting mengapa bantuan darurat yang awalnya bersifat sementara kini menjadi permanen? Hal tersebut menunjukkan kegagalan negara untuk membuat sistem ketahanan ekonomi yang berkelanjutan untuk rumah tangga miskin. BLT tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga telah membentuk pola ketergantungan ekonomi baru di tingkat rumah tangga. Ketika bantuan ini mengalami keterlambatan atau tidak disalurkan secara penuh, seperti yang terjadi pada tahun 2022 di mana hanya tahap pertama yang cair, warga mengalami tekanan ekonomi yang berat. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya peran BLT sebagai penopang keberlangsungan hidup bagi kelompok masyarakat miskin di desa ini.

Keberlanjutan BLT setelah pandemi dapat dianggap sebagai pengakuan pemerintah bahwa krisis ekonomi struktural masih berlangsung di lapisan masyarakat bawah, terutama di desa. Ketergantungan warga pada BLT menunjukkan bahwa upaya untuk mendorong ekonomi melalui program lain seperti penciptaan lapangan kerja, padat karya, atau pelatihan keterampilan belum berhasil. Akibatnya, BLT telah berkembang

dari sekadar tindakan darurat menjadi alat untuk stabilitas sosial. Namun, hal ini juga membuka ruang kritik. Jika BLT terus disalurkan tanpa strategi keluar (exit strategy) yang jelas, ada risiko terciptanya ketergantungan jangka panjang yang justru melemahkan daya juang ekonomi masyarakat. Bantuan bersifat konsumtif semacam ini berpotensi menggeser fokus pembangunan desa dari pemberdayaan menuju pengasuhan (charity-based development). Selain itu, pertanyaan juga muncul terkait transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dalam proses penetapan penerima manfaat di tengah praktik-praktik birokrasi desa yang belum sepenuhnya bersih.

Penggunaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa seperti Sumengko, menunjukkan dinamika dalam hubungan kuasa antara negara dan warga. Dalam skema ini, negara bertindak sebagai satu-satunya pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan siapa yang berhak atas bantuan, berapa banyak uang yang diberikan, dan kapan bantuan diberikan. Sebaliknya, warga dianggap sebagai "subjek pasif" yang hanya menerima dan menerima informasi, tanpa kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bagaimana kekuasaan negara bekerja melalui mekanisme birokratis dan teknokratis, yang menempatkan penduduk miskin sebagai objek kebijakan daripada subjek yang dapat diandalkan. Meskipun penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara resmi dilakukan melalui musyawarah desa, musyawarah tersebut seringkali tidak terbuka dan dapat diwarnai oleh konflik kepentingan antara kepala desa, ketua RT, dan pihak-pihak lain dalam struktur pemerintahan lokal. Namun, musyawarah tersebut seringkali berlangsung secara top-down. Ini menunjukkan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, di mana penduduk tidak memiliki kendali atas proses yang sangat penting untuk kesejahteraan hidup mereka.

Orang-orang dapat terjebak dalam ketergantungan struktural terhadap negara karena kecenderungan ini. BLT telah berkembang menjadi bukan hanya alat distribusi ekonomi tetapi juga instrumen kekuasaan, yang secara efektif membentuk pola kepatuhan warga terhadap negara. Dalam keadaan seperti ini, warga biasanya menerima bantuan dengan sikap "nrimo" atau pasrah, bukan sebagai hak yang diperjuangkan, melainkan sebagai kemurahan hati dari atas. Ini mengumpulkan kemampuan kritis warga dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sistem distribusi sosial yang lebih adil dan berpartisipasi. Dengan kata lain, metode penerapan BLT seperti ini justru memperkuat relasi hierarkis yang timpang antara negara dan warganya daripada mendorong pemberdayaan. Dibutuhkan pergeseran paradigma dalam praktik kebijakan bantuan sosial. Ini harus beralih dari pendekatan karitatif ke pendekatan transformatif dan partisipatif yang mengakui bahwa warga adalah pihak yang bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri.

Kondisi Sosial dan Ekonomi Penerima BLT

Para penerima BLT yang menjadi informan dalam penelitian ini umumnya berasal dari lapisan masyarakat dengan kondisi sosial-ekonomi yang rentan. Mereka bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu, bahkan sebagian sudah tidak bekerja karena usia lanjut atau tidak ada lagi peluang kerja. Sebagai contoh, S (60 tahun), seorang janda yang tinggal bersama cucunya, menggambarkan pekerjaannya sebagai buruh yang hanya mendapat penghasilan jika ada tetangga yang memanggilnya. Ia mengaku, *"Kadang sehari cuma dapat dua puluh ribu, kalau nggak ada yang nyuci ya saya cuma duduk di rumah."* Kondisinya diperparah dengan tanggungan cucu yang masih sekolah. Sementara itu, SN (52 tahun), petani penggarap, menyampaikan bahwa penghasilannya sangat tergantung pada musim panen. Ia mengatakan, *"Kalau lagi panen bagus, ya dapat dua juta sekali panen. Tapi itu buat pupuk, sewa traktor, belum belanja rumah tangga."* Ia menggarap sawah milik tetangga seluas 0,3 hektare, yang hasilnya sangat bergantung pada cuaca dan harga pasar. Buruh tani seperti K (58 tahun) bahkan tidak memiliki lahan sendiri. Ia mengandalkan upah harian dari kerja menanam dan memanen di lahan orang lain. *"Kalau musim tanam ramai, saya kerja. Tapi kalau nggak ada musim, ya nggak kerja. Kadang sebulan cuma kerja seminggu."* Kondisi pengangguran juga dialami oleh R (33 tahun), korban PHK dari pabrik di kota. Setelah kembali ke desa, ia belum mendapatkan pekerjaan tetap. Ia berkata, *"Saya sudah lamar ke mana-mana, tapi nggak ada panggilan. Sementara makan tetap harus jalan, ya ikut-ikut proyek kalau ada."* Salah satu informan yang paling rentan adalah P (73 tahun), janda lansia yang tinggal sendirian di rumah kayu tua. Ia tidak memiliki penghasilan tetap dan hanya sesekali menjual pisang goreng. *"Kalau anak ngirim, ya alhamdulillah. Kalau nggak, saya jualan gorengan. Tapi ya laku atau tidak, nasib."*

Pengalaman para informan dalam menerima BLT menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka mendapatkan bantuan tanpa pengetahuan yang utuh tentang proses administratifnya. Mereka menjadi penerima melalui mekanisme pendataan dari pihak RT atau perangkat desa, tetapi tidak semua mengetahui mengapa dan bagaimana mereka bisa masuk dalam daftar. SN menjelaskan, *"Saya waktu itu cuma dikasih tahu sama Pak RT, disuruh nyiapin fotokopi KK dan KTP. Katanya untuk pendataan warga terdampak. Setelah itu saya disuruh datang ke balai desa, ternyata ambil bantuan."* Proses pendaftaran serupa juga dialami oleh R, yang menunjukkan bahwa dokumen formal seperti surat PHK ikut dilampirkan. Namun, ia

sendiri mengaku tidak tahu bagaimana proses seleksi di tingkat desa berlangsung. *“Saya ngasih semua yang diminta, habis itu nunggu aja. Tiba-tiba dipanggil, katanya saya masuk daftar.”* Tidak ada informan yang menerima penjelasan tertulis atau sosialisasi resmi mengenai prosedur, hak, atau ketentuan sebagai penerima BLT. Informasi disampaikan melalui jalur informal, seperti grup WhatsApp RT atau kabar dari mulut ke mulut. S mengatakan, *“Saya cuma dikasih tahu sama Pak RT, ‘Bu, nanti hari Jumat ke balai desa, ada bantuan. Tapi saya nggak tahu itu bantuan apa dan kenapa saya dapat.’”*

Secara umum, informan merasa bahwa BLT sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan mendesak, terutama kebutuhan pangan. Namun, tidak ada satupun informan yang menyatakan bahwa bantuan tersebut mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka dalam waktu satu bulan penuh. S mengatakan dengan lugas, *“Uang BLT itu langsung habis dalam lima hari. Saya beli beras, minyak, dan sabun. Habis itu, ya balik lagi ke nyuci.”* Pernyataan ini juga diamini oleh P yang menggunakan dana bantuan untuk membeli obat dan makanan pokok: *“Saya irit banget. Kadang beli beras cuma 2 kg, sisanya buat teh sama minyak.”* Beberapa informan menyebut bantuan ini sebagai “penolong sementara,” yang tidak menyentuh akar persoalan struktural. Ibu Marni, petani sekaligus pengurus kelompok wanita tani, mengungkapkan, *“Bantuan ini seperti obat penghilang sakit saja. Petani tetap susah cari pupuk dan harga panen masih murah. BLT tidak menyelesaikan itu.”* Perasaan saat menerima bantuan juga mengandung unsur ambivalensi. Di satu sisi, para informan bersyukur dan merasa diperhatikan. Di sisi lain, mereka merasa malu karena status kemiskinan mereka menjadi konsumsi publik. R berkata, *“Saya bersyukur, tapi juga malu. Rasanya kayak digarisin kalau saya ini orang miskin.”* Ini bukan sekadar pernyataan pribadi, itu adalah manifestasi dari struktur sosial yang menganggap kemiskinan sebagai tanda inferioritas. Menerima uang bukanlah alasan mereka malu; sebaliknya, bantuan menunjukkan status sosial mereka secara publik. Gands menyebut ini sebagai fungsi moral dari kemiskinan, di mana orang miskin berfungsi sebagai representasi dari kegagalan yang digunakan sebagai pembatas simbolik oleh masyarakat yang lebih kaya.

Kemiskinan sebagai Konstruksi Sosial dan Fungsional

Kemiskinan dalam masyarakat sering kali dipandang sebagai kondisi yang harus diatasi, dikurangi, bahkan dihapuskan melalui intervensi kebijakan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, Herbert Gans (1971) menantang gagasan ini dengan menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya muncul sebagai akibat dari kegagalan sistem, tetapi juga berfungsi secara struktural untuk kelompok masyarakat tertentu. Gans menyebutkan dalam esainya yang terkenal "The Uses of Poverty: The Poor Pay All" bahwa orang miskin memiliki banyak manfaat bagi kelompok dominan, baik secara ekonomi, politis, maupun sosial-budaya. Namun, Herbert Gans (1971) menantang ide ini dengan menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya muncul sebagai akibat dari kesalahan sistem, tetapi juga berfungsi secara struktural untuk kelompok masyarakat tertentu. Dalam esainya yang terkenal, "The Uses of Poverty: The Poor Pay All," Gans mengatakan bahwa orang miskin mendapatkan banyak keuntungan dari kelompok dominan dalam hal ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Orang miskin menyediakan tenaga kerja dengan upah rendah sebagai salah satu fungsi pertama yang diuraikan Gans.

a. Fungsi Ekonomi

Profil informan seperti K (buruh tani) dan S (buruh cuci), yang keduanya bekerja dengan upah harian rendah tanpa perlindungan sosial, menunjukkan hal ini. Karena keberadaan mereka, sektor pertanian dan jasa domestik informal tetap ada. K mengatakan, *“Saya buruh tani, kerja di sawah orang. Biasanya ikut nandur, matun, panen. Upahnya harian, Rp40.000–Rp50.000 per hari tergantung musim.”* Sistem ini menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki fungsi ekonomi, dengan menjaga upah murah yang menguntungkan pemilik lahan dan masyarakat kelas atas desa. *“Orang miskin melakukan pekerjaan kotor masyarakat dengan harga murah,”* kata Gans. Melalui pekerjaan tidak layak yang tidak mungkin dilakukan oleh kelas menengah, mereka menjadi komponen yang memungkinkan adanya perbedaan kelas. Hal ini mencerminkan bagaimana sistem sosial lokal mempertahankan upah murah demi menopang aktivitas ekonomi desa, terutama sektor pertanian dan domestik.

b. Fungsi Sosial dan Budaya

Kemiskinan yang ada memiliki fungsi sosial-budaya, yaitu menjadi simbol inferioritas dan penguatan nilai-nilai dominan yang mendefinisikan "kemiskinan." S mengatakan, *“Campur aduk. Senang karena dibantu, tapi juga malu karena di depan umum dibagikan, jadi orang tahu siapa yang miskin.”* dan R, *“Kadang saya ingin menyampaikan bahwa ada yang lebih layak tapi tidak dapat, tapi saya tahan karena takut dibilang tidak bersyukur atau malah tidak dikasih bantuan lagi.”* Mereka mengatakan malu karena dianggap "miskin" di depan umum. Ini menunjukkan bahwa penerima bantuan bukan hanya diposisikan secara finansial, tetapi mereka juga digambarkan sebagai "yang kekurangan" secara simbolik. Gans mengatakan bahwa orang miskin membantu menetapkan batas moral dan kultural

masyarakat karena mereka menjadi contoh tentang apa yang tidak seharusnya terjadi. Sistem sosial yang membedakan antara "yang layak" dan "yang gagal" diperkuat oleh Stigmatisasi ini, tanpa mempertimbangkan struktur ketimpangan yang menyebabkan kemiskinan itu sendiri. Lebih dari itu, proses distribusi bantuan yang tidak transparan dan tidak melibatkan warga juga menunjukkan penghilangan agensi sosial yang digunakan oleh warga miskin. Sebagaimana ditunjukkan oleh pernyataan yang dibuat oleh M, yang tidak pernah diundang ke rapat desa, *"Informasinya minim. Hanya diumumkan lewat pengurus RT dan disampaikan dari mulut ke mulut. Tidak ada sosialisasi di balai desa atau edaran tertulis."* orang miskin hanyalah objek dari kebijakan dan bukan subjek yang memiliki hak untuk menentukan hidup mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bagaimana bantuan sosial bukan hanya mendefinisikan status ekonomi, tetapi juga menciptakan stigma kultural tentang "kekurangan" dan ketidaklayakan sosial.

c. Fungsi Politik

Kemiskinan juga dimanfaatkan untuk tujuan politik untuk mempertahankan keadaan saat ini melalui pembentukan hubungan simbolik antara orang miskin dan pemerintah. Meskipun berasal dari pemerintah pusat, peran perangkat desa sebagai "penyalur kebaikan" diperkuat dalam praktik distribusi program BLT. S mengatakan, *"saya merasa perlu mengucapkan terima kasih ke Pak Lurah. Meski ini uang negara, tapi kalau nggak lewat mereka kan kita nggak tahu bisa dapat atau tidak"*. Diperkuat pernyataan P, *"saya selalu ucapkan terima kasih pada Pak RT dan Pak Lurah, karena saya takut kalau tidak sopan nanti tidak dikasih lagi."* Mereka selalu mengucapkan terima kasih kepada perangkat desa dan takut menyampaikan kritik karena khawatir mereka akan "dianggap tidak tahu diri" atau "dicoret dari daftar". Akibatnya, mereka secara tidak sadar telah kehilangan kebebasan politik mereka dan bergabung dalam relasi kuasa patron-klien. Gans menyebut ini sebagai *"political function of poverty,"* di mana kelompok miskin menjadi kurang vokal secara politik karena rasa takut dan hutang budi. Ini memberi keuntungan bagi penguasa lokal yang tidak terganggu posisinya dan bahkan memperkuat legitimasi kekuasaannya melalui distribusi simbolik.

d. Fungsi Stabilisasi Sistem

BLT berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi ketidakpuasan sosial daripada sebagai alat pemberdayaan yang sebenarnya. Orang miskin dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas sosial, kata gans, dengan memberi mereka bantuan minimal untuk mencegah mereka memberontak atau mengganggu ketertiban. Menurut S dan SN, bantuan tunai sebesar Rp300.000 per bulan, meskipun sangat kecil, cukup untuk "meredam kegelisahan" dan menciptakan suasana yang semu bahwa negara telah "hadir", meskipun akar masalah kemiskinan masih belum diselesaikan secara struktural. Hal ini sejalan dengan konsep *"poverty as social buffer,"* di mana keberadaan orang miskin dan pemberian bantuan minimal membantu sistem merespons krisis tanpa benar-benar mengubah struktur distribusi ekonomi atau relasi kekuasaan.

e. Fungsi Ideologis

Kita juga menemukan fungsi ideologis dari kemiskinan yang ada, dimana keberadaan orang miskin digunakan untuk melegitimasi sistem ekonomi yang tidak stabil. Sistem kemiskinan telah berhasil menciptakan kesadaran yang tunduk dan membenarkan ketimpangan. Para penerima BLT mengatakan bahwa mereka pasrah dan tidak berani mengeluh karena takut tidak dapat bantuan. *"Saya diam saja. Kalau banyak tanya, nanti dibilang tidak tahu diri,"* kata S. Kalimat ini lebih dari sekadar ekspresi pribadi, itu adalah manifestasi dari ideologi yang berkuasa yang secara konsisten menempatkan orang miskin di bawah. BLT, alih-alih memberdayakan, justru membentuk kesadaran pasrah. Para informan menyebut diri mereka "beruntung" karena mendapat bantuan, bukan sebagai warga yang punya hak. Ini menunjukkan bahwa sistem ideologis yang melingkupi BLT memperkuat dominasi simbolik dan membuat kemiskinan tetap dipelihara sebagai status sosial yang sah dan "diterima".

Oleh karena itu, bantuan seperti BLT tidak membebaskan, tetapi memperpanjang kekuasaan struktural. BLT tidak sepenuhnya berfungsi sebagai alat pemberdayaan sosial. Sebaliknya, BLT berfungsi sebagai mekanisme tersembunyi untuk mempertahankan status kemiskinan melalui berbagai cara, seperti sebagai penyedia buruh murah, alat untuk mengontrol politik, simbol inferioritas sosial, penghambat demonstrasi, dan pendukung ideologi yang berlaku. Kemiskinan telah dipelihara sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar melalui distribusi bantuan yang tidak transparan, seleksi yang tidak partisipatif, dan ketergantungan simbolik pada elite desa. Dengan kata lain, kemiskinan bukan hanya akibat dari kurangnya sumber daya; itu merupakan bagian dari hierarki hubungan kekuasaan yang kompleks.

Pihak-Pihak yang Diuntungkan dari Pemeliharaan Kemiskinan melalui BLT

Kemiskinan memberikan fungsi dan keuntungan tertentu bagi kelompok dominan, kemiskinan tetap ada, menurut analisis Herbert Gans. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa aktor diuntungkan oleh keberlanjutan kemiskinan struktural secara langsung maupun tidak langsung dalam konteks distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tingkat desa. Meskipun BLT didanai dari dana pusat, kelompok pertama yang paling jelas menerima keuntungan adalah aparat desa, terutama perangkat desa, kepala dusun, dan ketua RT/RW. BLT didistribusikan melalui sistem administrasi lokal, yang memberikan elite desa ruang kendali informal dan simbolik. Seperti yang dinyatakan SN, *“Waktu itu ada pendataan ulang dari desa. Pak RT datang ke rumah, tanya penghasilan dan pekerjaan. Saya kasih fotokopi KTP dan KK. Setelah itu saya diminta datang ke balai desa untuk verifikasi. Beberapa minggu kemudian, nama saya muncul dalam daftar penerima BLT Dana Desa.”* Warga tidak pernah terlibat dalam proses pemilihan penerima. Daftar penerima dapat digunakan oleh perangkat desa sebagai alat kontrol sosial dan politik, membuka ruang arbitrase kuasa. Bahkan beberapa informan percaya bahwa mereka harus "berterima kasih" untuk tetap diterima. Karena warga melihat mereka sebagai "pintu masuk" untuk mendapatkan akses ke sumber daya negara, aparat desa memperkuat posisi mereka dalam struktur sosial desa dan memberi mereka kapital simbolik dan politik yang berguna dalam pemilu lokal, pembentukan lembaga desa, dan urusan pribadi mereka melalui BLT.

Secara lebih luas, melalui pemberian bantuan seperti BLT, pemerintah pusat juga mendapat keuntungan simbolik dan politik dari keberadaan kemiskinan. Meskipun nilai BLT tidak cukup untuk mengubah kondisi ekonomi warga miskin, kebijakan ini membangun kesan bahwa negara "hadir dan peduli". Efek instan yang dihasilkan oleh bantuan langsung mudah dimanfaatkan secara politik, terutama menjelang proses elektoral. Padahal, secara substansi, mereka masih berada dalam situasi struktural yang tidak berubah, warga seperti S dan P mengucapkan terima kasih dan bahkan "berterima kasih kepada pemerintah." Ungkapan ini mencerminkan internalisasi simbolik bahwa negara hadir dan peduli, meskipun bantuan tersebut minim dan tidak menyelesaikan akar kemiskinan. Namun BLT berfungsi sebagai alat simbolik untuk merawat legitimasi pemerintah pusat di mata warga miskin.

BLT bukan hanya alat untuk kesejahteraan tetapi juga alat untuk mempromosikan politik, membantu pemerintah pusat mempertahankan kekuasaan di mata masyarakat bawah. Jaringan administrasi dan lembaga pendukung, termasuk pendamping desa, operator data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dan pihak ketiga yang ditunjuk selama proses distribusi bantuan, adalah kelompok lain yang mendapat keuntungan. Dalam banyak kasus, upaya memperbaiki data kemiskinan berlangsung lambat karena ada insentif struktural untuk mempertahankan data lama untuk melanjutkan program dan anggaran. Dengan terlihatnya mereka ketika pembagian BLT mereka sedang “memperlihatkan” bahwa merekalah penghubung antara negara dan rakyat. Ini memperkuat legitimasi mereka sebagai “pemilik kuasa distribusi”, walau secara formal mereka hanya pelaksana teknis. Hal ini bukan sekadar prosedur teknis, tetapi merupakan bentuk pertunjukan kuasa simbolik. Ini sejalan dengan fungsi ideologis kemiskinan menurut Gans. Selain itu warga tidak hanya menerima uang, tetapi juga menginternalisasi relasi kuasa di mana aparat lokal tampil sebagai wakil negara yang ‘bermurah hati’. Ini memperkuat hubungan patron-klien dan fungsi politik kemiskinan sebagaimana dijelaskan oleh Gans.” Dengan adanya kemiskinan, proyek penanggulangan kemiskinan dapat bertahan dan menghasilkan pekerjaan dan anggaran. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya menjadi subjek perhatian, tetapi juga sumber daya birokrasi.

KESIMPULAN

Bantuan Langsung Tunai (BLT) memang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat miskin di desa, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan kebutuhan rumah tangga jangka pendek. Namun, berdasarkan wawancara dengan enam informan dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, terlihat bahwa program ini tidak berjalan dalam ruang yang netral. Pelaksanaan BLT justru menunjukkan adanya relasi kuasa yang memelihara struktur sosial yang timpang di tingkat desa. Dalam konteks ini, warga miskin tetap menempati posisi yang secara ekonomi dibutuhkan sebagai tenaga kerja murah, seperti buruh tani dan pekerja domestik, yang menopang ekonomi lokal.

Teori Herbert Gans tentang fungsi positif kemiskinan menunjukkan bahwa secara politik, warga miskin mempertahankan dominasi elite lokal karena ketergantungan mereka terhadap distribusi bantuan yang dikendalikan oleh aparat desa. Ketakutan akan dikeluarkan dari daftar penerima membuat mereka enggan bertanya atau mengkritik. Secara sosial-budaya, bantuan ini membentuk batas simbolik dan stigma antara yang dianggap layak dan tidak layak menerima bantuan, memperkuat posisi elite sebagai penentu. Secara ideologis, BLT menciptakan ilusi kehadiran negara yang peduli, namun pada saat yang sama memperkuat

kesadaran pasrah, tunduk, dan tergantung. Dengan demikian, BLT tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga menjadi mekanisme reproduksi subordinasi yang secara laten menguntungkan kelompok dominan dan memperpanjang kemiskinan struktural.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Kebijakan BLT harus dilengkapi dengan mekanisme pemberdayaan ekonomi jangka panjang. BLT hanya bersifat paliatif. Pemerintah perlu memastikan ada program lanjutan yang mendorong kemandirian ekonomi seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan, atau penguatan usaha mikro berbasis desa.
2. Perlu ada transparansi dan partisipasi warga dalam proses seleksi penerima. Pemerintah desa sebaiknya membuka forum musyawarah terbuka yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, agar proses seleksi tidak menjadi instrumen politik atau kekuasaan lokal.
3. Pentingnya pengawasan independen terhadap distribusi bantuan. Pemerintah daerah dan lembaga pengawas sosial harus aktif melakukan monitoring dan audit sosial terhadap distribusi bantuan, serta membuka kanal pengaduan warga yang aman dari intimidasi.
4. Perubahan pendekatan distribusi dari top-down menjadi berbasis komunitas. BLT sebaiknya tidak hanya dikelola secara administratif oleh elite desa, tetapi juga melibatkan kelompok masyarakat sipil lokal seperti karang taruna, kelompok tani, atau pengurus RT/RW yang terverifikasi.
5. Pendidikan politik warga miskin perlu diperkuat. Agar warga tidak terus-menerus berada dalam posisi pasif, perlu ada upaya penyadaran hak-hak warga dalam bentuk pendidikan kritis berbasis komunitas yang mengangkat suara-suara warga marjinal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A., & Suhartini, D. (2021). Efektivitas Dana Desa untuk BLT sebagai bentuk kesejahteraan masyarakat di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 354–362.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2024. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk. (2024). Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Nganjuk 2024. <https://nganjukkab.bps.go.id>
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Edin, K., & Lein, L. (1997). *Making ends meet: How single mothers survive welfare and low-wage work*. Russell Sage Foundation.
- Eni, S., & Razak, S. (2021). Analisis tingkat kesenjangan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat Muslim di pedesaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 30–40.
- Ferguson, J. (1990). *The anti-politics machine: "Development," depoliticization and bureaucratic power in Lesotho*. University of Minnesota Press.
- Gans, H. J. (1971). The uses of poverty: The poor pay all. *Social Policy*, 2(1), 1–15.
- Gans, H. J. (1972). The positive functions of poverty. *American Journal of Sociology*, 78(2), 275–289. <https://doi.org/10.1086/225324>
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2017). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. Routledge.
- Jurnalistik H2. (2023, September). Desa Sumengko menjadi tempat pengrajin shuttlecock terbesar di Nganjuk. <https://jurnalistikh2.blogspot.com/2023/09/desa-sumengko-menjadi-tempat-pengrajin.html>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Pedoman umum pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)*.
- Kusnadi, D. (2021). Politik Dana Desa dan reproduksi patronase lokal: Studi kasus di Jawa Timur. *Jurnal Politik Profetik*, 9(1), 45–62.
- Kusnadi, K. (2015). *Kemiskinan struktural di pedesaan Indonesia*. LKiS.
- Latif, Y. (2020). Negara, kelas menengah, dan krisis kebijakan publik. *Kompas Media Nusantara*.
- Nickwrendnotes. (2016, Februari). Mengatasi kemiskinan di Nganjuk. <https://nickwrendnotes.blogspot.com/2016/02/mengatasi-kemiskinan-di-nganjuk.html>
- Nugroho, H. (2023). *Kritik terhadap kebijakan BLT di masa pandemi: Pendekatan kesejahteraan struktural*. Penerbit Obor.
- Panuna, D., Hatu, R. A., Ibrahim, R., & Latare, S. (2020). Penerapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada keluarga miskin di Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo. *Sosiologi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1–10.

- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Putra, M. A., & Wulandari, R. (2021). Efektivitas program bantuan langsung tunai (BLT) dalam penanganan dampak ekonomi COVID-19. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(3), 210–225. <https://doi.org/10.22146/jsp.123456>
- Putri, A. A., Dersanala, D., Nurcahyaningih, R., Saputri, Y. I., & Wulandari, E. (2022). Analisis permasalahan program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) dan alokasi dana stimulan pada Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. *WANARGI: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 1(4), 45–55.
- Rachman, I. R., & Purwanto, E. (2020). Analisis efisiensi produksi padi sawah dengan pendekatan Stochastic Frontier Analysis di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(1), 10–22. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/7109>
- Sandrawati, R. (2022). Efektivitas kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selama pandemi COVID-19 di Desa Sebagin, Kabupaten Bangka Selatan. *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(1), 15–25.
- Sulistiyono, A. (2020). *Kemiskinan dan kuasa di pedesaan Jawa*. Insist Press.
- Sulistiyanto, H. (2020). BLT dan relasi kuasa dalam distribusi bansos di tingkat lokal: Studi kasus di desa X. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(1), 55–72.
- Widodo, T. (2022). Pemberdayaan ekonomi pengrajin shuttlecock di Desa Sumengko melalui pendidikan non-formal (Skripsi, Universitas Negeri Malang). <https://repository.um.ac.id/61692>
- Wilson, W. J. (1987). *The truly disadvantaged: The inner city, the underclass, and public policy*. University of Chicago Press.
- Wulandari, R. A., & Nugroho, H. A. (2022). Efektivitas program BLT Dana Desa terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 45–56.
- Yasmin, S., & Arifianto, A. (2021). Political clientelism and social assistance in rural Indonesia during the pandemic. *Contemporary Southeast Asia*, 43(2), 253–276. <https://doi.org/10.1355/cs43-2e>
- Yusuf, N. R., Hidayat, R., & Djabbar, I. (2021). Kemampuan desa dalam mengelola Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) secara akuntabel. *Jurnal Neo Societal*, 6(2), 100–110.